



PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA

TAHUN 2023-2026



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun pengganti RPJM.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

B

- f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupater. Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

h

- u. Renstra Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renstra Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renstra Kecamatan Langkahan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renstra Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renstra Kecamatan Seunuddon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renstra Kecamatan Baktiya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renstra Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renstra Kecamatan Lhoksukon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renstra Kecamatan Cot Girek Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renstra Kecamatan Paya Bakong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renstra Kecamatan Pirak Timu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;

h

- mm. Renstra Kecamatan Matangkuli Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renstra Kecamatan Tanah Luas Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renstra Kecamatan Nibong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renstra Kecamatan Lapang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renstra Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renstra Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renstra Kecamatan Samudera Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renstra Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renstra Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renstra Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renstra Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renstra Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renstra Kecamatan Dewantara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renstra Kecamatan Nisam Antara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renstra Kecamatan Nisam Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renstra Kecamatan Banda Baro Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renstra Kecamatan Muara Batu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renstra Kecamatan Sawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIX; dan
- hhh. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX.

h

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

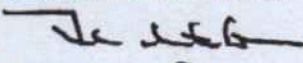
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2023-2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H


BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Juli 2022 M
7 Dzulhijjah 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


DAYAN ALBAR


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2023-2026.

Seiring diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menggambarkan evaluasi hasil capaian kinerja, isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan melalui pendanaan indikatif. Renstra ini menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahunnya selama periode 2023-2026.

Kepada para pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia ini kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa penyusunan renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan renstra ini sangat kami harapkan.

Lhokseumawe, 10 Mei 2022

 Direktur RSUD Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara



dr. Bafhaqi

Pembina Tk.I

Nip. 19770827 200904 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi. | ii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| BAB I Pendahuluan. | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II Gambaran Pelayanan RSUD Cut Meutia. | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Cut meutia | 9 |
| 2.2 Sumber Daya RSUD Cut Meutia..... | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Cut Meutia | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Cut Meutia..... | 31 |
| BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis RSUD Cut Meutia. | 40 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 40 |
| 3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh | 40 |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 46 |
| 2.4 Penentuan Isu-isu Strategis | 47 |
| BAB IV Tujuan dan Sasaran. | 49 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Cut Meutia | 49 |

| | |
|---|----|
| BAB V Strategis dan Arah Kebijakan. | 51 |
| BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 55 |
| BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | 58 |
| BAB VIII Penutup | 60 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai PNS & Non PNS Pada RSUD Cut Meutia Menurut Tingkat Kedudukan dalam Organisasi Unit Kerja RSUD Cut Meutia Per 31 Desember 2021. | 21 |
| Tabel 2.1 | Nilai Sarana dan Prasarana RSUD Cut Meutia Aceh Utara.. | 22 |
| Tabel 2.3.a | Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara..... | 24 |
| Tabel 2.3.b | Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara..... | 25 |
| Tabel 2.4.a | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara..... | 27 |
| Tabel 2.4.b | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara..... | 29 |
| Tabel 2.5 | Analisis Peluang dan Ancaman Organisasi Dengan Menggunakan Matriks EFE..... | 32 |
| Tabel 2.6 | Analisis Peluang dan Ancaman Organisasi Dengan Menggunakan Matriks EFE..... | 33 |
| Tabel 2.7 | Indikator Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017-2021. | 36 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2017-2021. | 36 |
| Tabel 2.9 | Angka Rujukan Pasien Tahun 2017-2021. | 37 |
| Tabel 2.10 | Data Pelayanan Pasien Covid-19. | 37 |
| Tabel 4 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara..... | 50 |
| Tabel 5 | Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan. | 54 |
| Tabel 6 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindak lanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rumah Sakit Umum (RSU) Cut Meutia merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pusat rujukan di Kabupaten Aceh Utara. Dimana bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang memerlukan penanganan yang serius, sehingga masyarakat yang terlayani akan merasakan keberadaan RSU Cut Meutia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/2166/11 tanggal 22 agustus

2011 RSUD Cut Meutia ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas B. Dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan fleksibilitas anggaran dan belanja, sesuai amanat Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Maka ditetapkanlah RSUD Cut Meutia sebagai RSUD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan surat Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/ 368/ 2015 tanggal 22 Mei 2015.

Akreditasi RSUD Cut Meutia saat ini lulus tingkat paripurna ditandai dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/1096/I/2018 tanggal 15 Januari 2018. Status paripurna merupakan salah satu syarat untuk dapat mengajukan sebagai RS Pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Provinsi Aceh. Melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK.01.07/MENKES/212/2019 tanggal 16 April 2019, ditetapkanlah RSUD Cut Meutia sebagai RS Pendidikan Utama. Dalam menghadapi tantangan yang ada RSUD Cut Meutia melakukan pembenahan secara bertahap dengan cara memenuhi kebutuhan akan alat-alat kesehatan baik dari kuantitas maupun kualitas, begitupun sarana dan prasarana yang lainnya disamping pembenahan sumber daya manusia yang ada.

Rencana strategis RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026 adalah dokumen kebijakan perencanaan rumah sakit yang disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Dengan adanya renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026, maka didapat gambaran perencanaan pemerintah daerah pada

bidang kesehatan khususnya pelayanan rujukan yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Proses penyusunan renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026 dimulai dengan menyusun data pencapaian 5 tahun ke belakang, melakukan analisis faktor internal dan eksternal, menggambarkan kondisi rumah sakit yang ada, merumuskan strategi perencanaan, menyusun program dan kegiatan selama 4 tahun ke depan kemudian dokumen tersebut bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja rumah sakit.

Renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan diaktualisasikan oleh RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/ Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 374/ Menkes/SK/ V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Kepmenkes RI Nomor :HK.03.05/I/2166/11 tentang Penetapan Kelas RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Kelas B;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2005-2025;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun

Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

21. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
23. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/ 368/ 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
24. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 440/ 574/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
25. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-4/297/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi RSU Cut Meutia tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman kebijakan pembangunan selama empat tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Rumah Sakit .

Adapun tujuan penyusunan renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronisasikan tujuan, sasaran, dan program, RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
2. Menjadi acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
3. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
4. Memudahkan RSUD Cut Meutia untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan.
5. Memudahkan aparatur RSUD Cut Meutia untuk memilih kebijakan program, kegiatan dan subkegiatan operasional tahunan untuk 4 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar lebih terfokus dan terarahnya Renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026, maka sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD CUT MEUTIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD

Cut Meutia

2.2 Sumber Daya RSUD Cut Meutia

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Cut Meutia

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Cut Meutia

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD CUT MEUTIA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Cut Meutia

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD CUT MEUTIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Cut Meutia

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan Qanun diatas diturunkan lagi menjadi Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara ditetapkan sebagai berikut:

Kedudukan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia adalah perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus dibidang kesehatan yang berkedudukan di bawah Bupati.
2. RSUD Cut Meutia dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
3. Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas

Sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara tersebut, RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

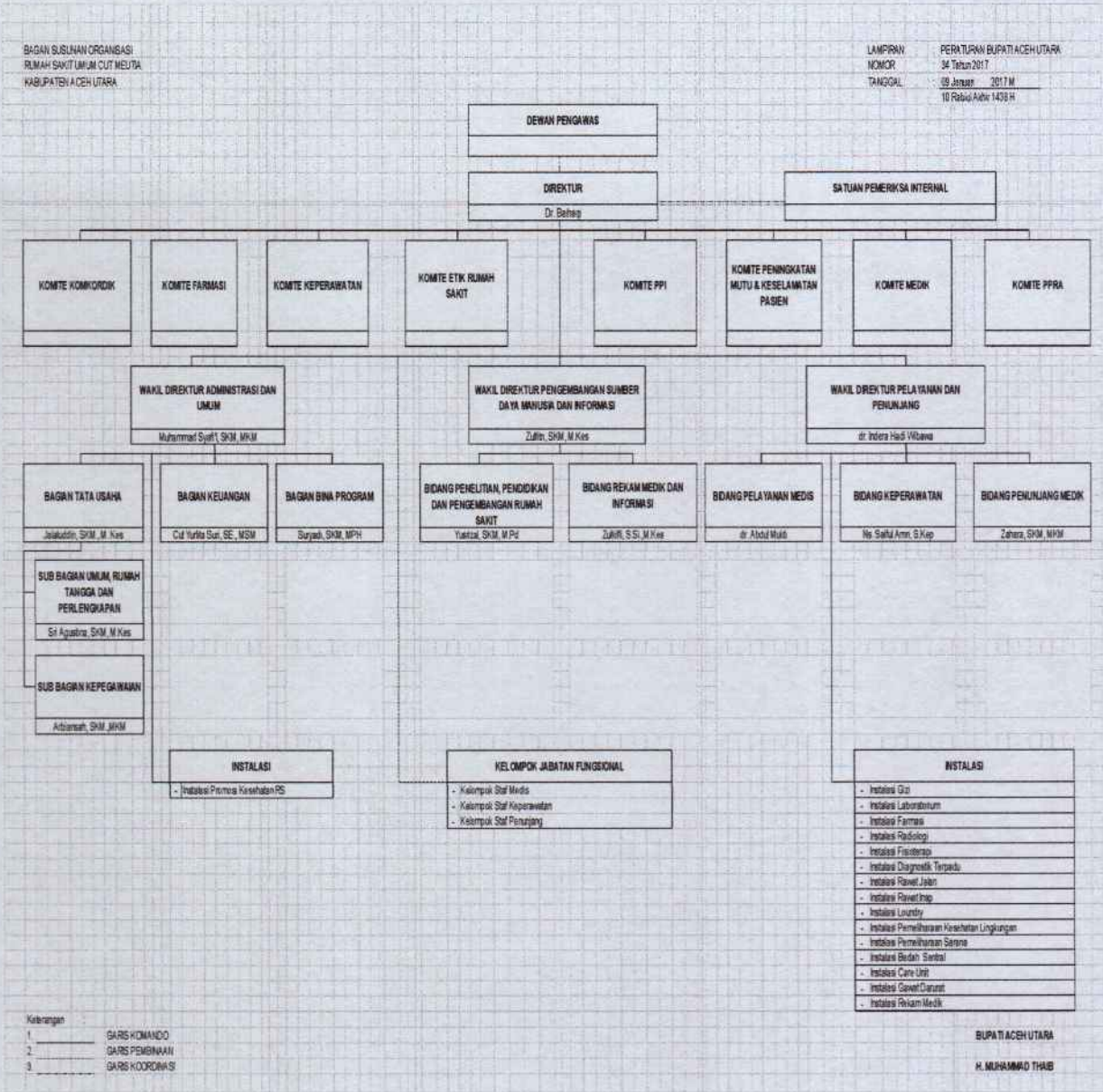
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya RSUD Cut Meutia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit umum;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan tata kerja RSUD Cut Meutia Aceh Utara mengacu kepada Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016. Adapun struktur organisasi RSUD Cut Meutia Aceh Utara berdasarkan Qanun tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi dan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang. Masing-masing Wakil Direktur dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang dan Masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Bidang dibantu oleh Kasubbag dan Kepala Seksi untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi sebagai berikut :



Sumber Subbag. Kepegawaian

**Bagan 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia
Kabupaten Aceh Utara**

Uraian Tugas :

A. Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketata usahaan rumah sakit umum;

- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

B. Wakil Direktur Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan aset, keuangan dan program, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1.1 Sub Bagian Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, protokoler, kearsipan, pengadaan dan administrasi perjalanan dinas, kebersihan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, perpustakaan, pergudangan non medis dan pengelolaan asrama, pengadaan barang dan jasa.

B.1.2 Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan analisis kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, pengawasan dan pembinaan disiplin, analisis jabatan dan kesejahteraan pegawai.

B.2. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penerimaan dan pengeluaran anggaran, mobilisasi dana serta akuntansi keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan;
- b. Pelaksanaan mobilisasi dana;
- c. Pelaksanaan dan koordinasi perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi keuangan;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi terkait dengan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 Bagian Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan dan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, jasa layanan dan APBN;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- e. Penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, penetapan kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur administrasi dan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi

Mempunyai tugas Pokok melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan Rumah Sakit serta bidang rekam medis dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan informasi;

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan serta kegiatan rekam medik dan informasi;
- c. Fasilitasi instalasi pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan praktek pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

C.1 Bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian semua kebutuhan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan rumah sakit, melakukan bimbingan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengembangan dan penelitian pelaksanaan kegiatan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kegiatan program penelitian, pendidikan dan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga non medis dan kesehatan lainnya;
- b. Penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, alat/bahan untuk fasilitas dan kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur pengembangan sumber daya manusia dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 Bidang Rekam Medis dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan dalam rangka pencatatan medis, informasi dan dokumentasi medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pengolahan catatan medis dan administrasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data visum et repertum;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur melalui wakil direktur pengembangan sumber daya manusia dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pasien, pelayanan darurat, intensif dan upaya rujukan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian fasilitas, pelayanan penunjang medik;
- c. Pelaksanaan pelayanan spesialistik;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 Bidang Pelayanan Medis

Mempunyai tugas melakukan pelayanan rawat jalan/inap dan rujukan serta pelayanan darurat, intensif dan bedah sentral, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pelayanan spesialisistik;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis;
- d. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat, intensif dan upaya rujukan;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan etika profesi dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- f. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

D.2 Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika profesi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan bimbingan, pemantauan, penilaian dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;

- b. Pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan, membina pelaksanaan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
- c. Pengkajian kebutuhan tenaga keperawatan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.3 Bidang Penunjang Medis

Mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan, pengkoordinasian semua kebutuhan, pengadaan sarana penunjang medis, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat/bahan untuk pengadaan sarana penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik;
- c. Penyiapan bahan dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten aceh utara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya RSUD Cut Meutia

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, RSUD Cut Meutia Aceh Utara memiliki pegawai/personil sebanyak 1.302 orang, yang terdiri

dari 443 orang berstatus PNS (26 orang PNS Struktural dan 417 PNS Fungsional/Non Struktural), tenaga honorer 5orang, tenaga kontrak 11 orang, tenaga bakti murni 3 orang, dan tenaga sukarela 840 orang. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.a di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS & Non PNS Pada RSUD Cut Meutia
Menurut Tingkat Kedudukan dalam Organisasi
Unit Kerja RSUD Cut Meutia Per 31 Desember 2021

| Rincian | Uraian | Jumlah Pegawai | | Ket |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-----|
| Jabatan (PNS & Non PNS) | Struktural | 27 | Orang | |
| | Non | 407 | Orang | |
| | Struktural/Fungsional | 10 | Orang | |
| | Dokter Diperbantukan | 23 | Orang | |
| | Tenaga Kontrak | 806 | Orang | |
| | Tenaga Sukarela | | | |
| Jumlah | | 1.273 | Orang | |
| Eselon | II | 0 | Orang | |
| | III | 11 | Orang | |
| | IV | 16 | Orang | |
| | Non Eselon | 1.246 | Orang | |
| Jumlah | | 1.273 | Orang | |
| Golongan | IV | 121 | Orang | |
| | III | 248 | Orang | |
| | II | 58 | Orang | |
| | I | 7 | Orang | |
| | Non Golongan | 839 | Orang | |
| Jumlah | | 1.273 | Orang | |
| Pendidikan (PNS & Non PNS) | Dokter Konsultan | 5 | Orang | |
| | Dokter Spesialis | 61 | Orang | |
| | S2 | 37 | Orang | |
| | Dokter Umum | 35 | Orang | |
| | Dokter Gigi | 3 | Orang | |
| | S.1 | 273 | Orang | |
| | D.IV | 38 | Orang | |

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|
| | D.III | 462 | Orang | |
| | D.I | 2 | Orang | |
| | SLTA | 344 | Orang | |
| | SLTP | 8 | Orang | |
| | SD | 5 | Orang | |
| Jumlah | | 1.273 | Orang | |

Sumber Subbag. Kepegawaian RSUD Cut Meutia

Selain sumber daya manusia, dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Cut Meutia Aceh Utara juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, peralatan dan mesin antara lain berupa kendaraan dinas, barang inventaris serta gedung, bangunan perkantoran dan fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Nilai Sarana dan Prasarana
RSUD Cut Meutia Aceh Utara

| No | Jenis barang | Nilai(Rp) |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Tanah | 1.996.208.750 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 147.995.025.396 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 81.473.960.845 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.071.685.869 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 178.000.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 69.400.000 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | -157.558.009.657 |
| Jumlah | | 77.226.271.202 |

Sumber: Laporan Keuangan 2021 RSUD Cut Meutia

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Cut Meutia

Setiap akhir periode instansi Perangkat Daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/ sasaran strategis RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun didalam dokumen penetapan kinerja.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSU Cut Meutia | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra RSU Cut Meutia Tahun Ke- | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------|---------|--------|
| | | | | | (2018) | (2019) | (2020) | (2018) | (2019) | (2020) | (2018) | (2019) | (2020) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Bed Occupancy Rate (BOR) | 100% | 100% | - | 83% | 84% | 85% | 83% | 81% | 54% | 100,00% | 96,43% | 63,53% |
| 2 | Cakupan Pelayanan Kesehatan | 100% | 100% | - | 86% | 87% | 88% | 85,29% | 87% | 86,19% | 99,17% | 100,00% | 97,94% |
| 3 | Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik | 100% | 100% | - | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Cakupan Fasilitas Yang Terstandar Sesuai Dengan Kelas Rumah Sakit | 100% | 100% | - | 0% | 77% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Cakupan Tenaga Terampil Sesuai Kompetensi di Bidangny | 100% | 100% | - | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik | 100% | 100% | - | 75% | 80% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Penggunaan Atribut Pegawai | 100% | 100% | - | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Tabel 2.3.b

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSU Cut Meutia | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra RSU Cut Meutia Tahun Ke- (2021) | (2022) | Realisasi Capaian Tahun Ke- (2021) | (2022) | Rasio Capaian pada Tahun Ke- (2021) | (2022) |
|----|--|----------------|---------------|--------------------------------|--|--------|---------------------------------------|--------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 100% | 100% | - | 77,50% | 80% | 76,63% | - | 98,88% | - |
| 2 | Nilai SAKIP RSU Cut Meutia | 100% | 100% | - | 84% | 85% | 84,54% | - | 99,36% | - |
| 3 | Angka Harapan Hidup | 100% | 100% | - | 71,70% | 71,90% | 68,80% | - | 95,96% | - |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mewajibkan agar setiap Perangkat Daerah melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada renstra Perangkat Daerah. Maka dilakukanlah Perubahan renstra RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2021 dan 2022. Tabel 2.3.a menggambarkan realisasi capaian kinerja tahun 2017-2020. Tabel 2.3.b menggambarkan realisasi capaian kinerja tahun 2021-2022.

Secara umum rasio capaian rata-rata 97%, disebabkan bertambahnya jenis layanan, pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan dalam penunjang pelayanan, kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan semakin tinggi dan terbangunnya koordinasi antar bidang. Keterbatasan dana APBD mungkin salah satu penyebab belum optimalnya capaian di awal kinerja tahun berjalan, sumber daya manusia yang didominasi non PNS dan tingkat kompetensi yang belum sesuai kebutuhan juga menjadi kendala.

Tabel 2.4.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| Uraian/ Program | Anggaran pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------|----------|-----------------------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 195,957,500 | 245,420,000 | 170,504,400 | 175,551,023 | 192,053,515 | 165,219,971 | 89.59 | 78.26 | 96.90 | 88.25 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 76,191,123 | 80,356,735 | 80,890,621 | 94.06 | 99.21 | 99.86 | 97.71 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 31,900,000 | 31,900,000 | 31,900,000 | 18,767,400 | 21,086,000 | 27,684,350 | 58.83 | 66.10 | 86.78 | 70.57 | | |
| Penyediaan jasa Administrasi Keuangan | 7,040,000 | 25,920,000 | 22,500,000 | 7,040,000 | 25,920,000 | 21,600,000 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.67 | | |
| Penyediaan bahan Logistik Kantor | 64,917,500 | 106,600,000 | 35,104,400 | 62,452,500 | 64,690,780 | 35,045,000 | 96.20 | 60.69 | 99.83 | 85.57 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (Kewajiban 2017) | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Kewajiban 2017) | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Penyediaan bahan Logistik Kantor (Kewajiban 2017) | 7,200,000 | - | - | 7,200,000 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Program Pelayanan Sosial dan Budaya | 10,000,000 | 14,050,000 | 6,187,500 | 8,198,750 | 11,717,500 | 4,605,000 | 81.99 | 83.40 | 74.42 | 79.94 | | |
| Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | 10,000,000 | 14,050,000 | 6,187,500 | 8,198,750 | 11,717,500 | 4,605,000 | 81.99 | 83.40 | 74.42 | 79.94 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | 97,125,000 | - | - | 96,570,000 | - | - | 99.43 | 96.43 | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor | - | - | 67,125,000 | - | - | 66,600,000 | - | - | 99.22 | 99.22 | | |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana Fasilitas Kantor | - | - | 30,000,000 | - | - | 29,970,000 | - | - | 99.90 | 99.90 | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | - | - | 500,000,000 | - | - | 495,636,253 | - | - | 99.13 | 99.13 | | |
| Penanggulangan Penyakit Infeksi Emergency Terentu Covid-19 (DID) | - | - | 500,000,000 | - | - | 495,636,253 | - | - | 99.13 | 99.13 | | |

| Uraian/ Program | Anggaran pada Tahun Ke- | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------|------------|----------------|-----------------------|--|
| | 2018 2 | 2019 3 | 2020 4 | 2018 5 | 2019 6 | 2020 7 | 2018 8 | 2019 9 | 2020 10 | Anggaran 11 | Realisasi 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 214,280,000 | 188,630,000 | 178,880,000 | 184,700,000 | 178,840,000 | 154,820,000 | 76.86 | 94.81 | 86.55 | 86.07 | | |
| Pendamping Pasien rujukan | 193,800,000 | 182,550,000 | 172,800,000 | 148,800,000 | 175,800,000 | 153,300,000 | 76.78 | 96.30 | 88.72 | 87.27 | | |
| Pengurusan dan penguburan jenazah terdilar | 20,480,000 | 6,080,000 | 6,080,000 | 15,900,000 | 3,040,000 | 1,520,000 | 77.84 | 50.00 | 25.00 | 50.88 | | |
| Pendamping Pasien rujukan (Kewajiban 2017) | 35,475,000 | - | - | 35,475,000 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Pengurusan dan penguburan jenazah terdilar (Kewajiban 2017) | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ rumah sakit Paru-Paru/ Rumah sakit Mata | 6,244,731,800 | 7,361,542,968 | 13,846,426,188 | 6,039,061,910 | 6,736,735,056 | 12,943,347,005 | 96.71 | 91.51 | 93.48 | 93.90 | | |
| Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit | - | 40,707,500 | - | - | 38,809,200 | - | - | 97.79 | - | 97.79 | | |
| Pengadaan Alat Kesehatan (Obus/ DOKA) | - | 2,320,836,488 | 1,334,203,000 | - | 2,320,537,383 | 1,334,203,000 | - | 99.99 | 100.00 | 99.99 | | |
| Pengadaan Alat -alat Kesehatan Rumah sakit (DAK) | 3,841,407,000 | 4,969,969,000 | - | 3,745,412,110 | 4,376,368,475 | - | 97.50 | 87.53 | - | 92.51 | | |
| Pembangunan dan Penyesuaian Pembangunan Gedung RS (DAK) | 1,501,800,000 | - | 5,300,488,000 | 1,456,413,000 | - | 5,265,657,000 | 96.99 | - | 96.34 | 96.17 | | |
| Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah (DAK) | 766,938,000 | - | - | 702,450,000 | - | - | 91.59 | - | - | 91.59 | | |
| Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit (Kewajiban 2017) | 134,786,800 | - | - | 134,786,800 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | | |
| Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi Covid-19 (DAK) | - | - | 2,000,000,000 | - | - | 1,943,799,755 | - | - | 97.19 | 97.19 | | |
| Pengadaan Peningkatan Medis Perawatan Pasien Covid 19 (BKK) | - | - | 3,012,823,977 | - | - | 2,351,998,425 | - | - | 78.07 | 78.07 | | |
| Pengadaan Makanan Tambahan Tenaga Kesehatan dan Insentif Relawan Kesehatan (BKK) | - | - | 450,000,000 | - | - | 423,299,069 | - | - | 94.06 | 94.06 | | |
| Pembangunan Ruang dan Instalasi Oksigen Sentral (DID) | - | - | 1,280,911,211 | - | - | 1,218,036,090 | - | - | 94.35 | 94.35 | | |
| Penyediaan Prasarana RS (DID) | - | - | 458,000,000 | - | - | 406,363,636 | - | - | 88.73 | 88.73 | | |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata | - | - | 267,900,000 | - | - | 235,879,089 | - | - | 88.05 | 88.05 | | |
| Pemeliharaan Rutin Berkala Ruang Rawat Inap Pasien Covid-19 (BKK) | - | - | 267,900,000 | - | - | 235,879,089 | - | - | 88.05 | 88.05 | | |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan | 132,493,963,000 | 138,000,000,000 | 136,239,714,000 | 121,777,151,953 | 114,322,063,839 | 114,802,436,839 | 91.91 | 82.84 | 84.27 | 86.34 | | |
| Penyediaan Jasa Layanan badan Umum daerah (BLUD) | 132,493,963,000 | 138,000,000,000 | 136,239,714,000 | 121,777,151,953 | 114,322,063,839 | 114,802,436,839 | 91.91 | 82.84 | 84.27 | 86.86 | | |
| TOTAL | 139,158,932,300 | 145,809,642,968 | 151,306,737,088 | 128,164,663,636 | 121,441,409,912 | 128,896,514,157 | 92.10 | 83.29 | 85.19 | 86.86 | | |

Tabel 2.4.b
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| Uraian/ Program | Anggaran pada Tahun Ke- | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|---|------|-----------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 133,688,962,527 | 131,520,224,348 | 119,734,409,542 | - | 89.56 | - | 89.56 | |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 30,288,476,927 | 30,718,770,224 | 30,203,335,732 | - | 99.72 | - | 99.72 | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30,266,876,927 | 30,697,170,224 | 30,181,735,732 | - | 99.72 | - | 99.72 | |
| - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 21,600,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | - | 100.00 | - | 100.00 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 163,985,600 | 173,604,124 | 163,795,000 | - | 99.88 | - | 99.88 | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 163,985,600 | 173,604,124 | 163,795,000 | - | 99.88 | - | 99.88 | |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,762,000 | - | 53.81 | - | 53.81 | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,762,000 | - | 53.81 | - | 53.81 | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 216,500,000 | 317,850,000 | 211,269,750 | - | 97.58 | - | 97.58 | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79,200,000 | 184,200,000 | 75,259,750 | - | 95.02 | - | 95.02 | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 137,300,000 | 133,650,000 | 136,000,000 | - | 99.05 | - | 99.05 | |
| Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | 103,000,000,000 | 100,290,000,000 | 89,145,257,060 | - | 86.55 | - | 86.55 | |
| - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 103,000,000,000 | 100,290,000,000 | 89,145,257,060 | - | 86.55 | - | 86.55 | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 14,808,489,837 | 3,396,724,464 | 13,537,318,829 | - | 91.42 | - | 91.42 | |
| Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 14,808,489,837 | 3,396,724,464 | 13,537,318,829 | - | 91.42 | - | 91.42 | |
| - Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 5,067,182,140 | - | 4,449,546,000 | - | 87.81 | - | 87.81 | |
| - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 9,650,067,797 | 3,396,724,464 | 9,016,646,369 | - | 93.44 | - | 93.44 | |
| - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 91,239,900 | - | 71,126,440 | - | 77.96 | - | 77.96 | |
| TOTAL | 148,497,452,364 | 134,916,948,812 | 133,271,728,371 | - | 89.75 | - | 89.75 | |

Dilihat dari tabel diatas, kinerja RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara secara umum baik, namun ada beberapa capaian yang tidak tercapai dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak awal tahun 2020. Saat terjadinya pandemi banyak anggaran yang dikurangi dan dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan di awal tidak berjalan sesuai rencana awal. Salah satu indikatornya adalah bed occupancy rate, di tahun 2020 ditargetkan 85 % namun realisasi yang dicapai sebesar 54 %. Hal ini disebabkan masyarakat takut untuk memanfaatkan fasilitas RSU Cut Meutia karena kondisi pandemi covid-19. Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara belum mampu menampung untuk pemenuhan belanja alat-alat kesehatan yang dibutuhkan RSU Cut Meutia dan untuk peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di RSU Cut Meutia.

Indikator kinerja RSU Cut Meutia tahun 2021 dan 2022 berubah menjadi 3 indikator, indeks kepuasan masyarakat, nilai sakin RSU Cut Meutia dan angka harapan hidup. Rata-rata rasio capaian indikator yang ada di RSU Cut Meutia adalah sebesar 98.06%, artinya RSU Cut Meutia cukup berhasil untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan namun kedepannya perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerja yang sudah ada.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Cut Meutia

Tantangan dan Peluang yang terjadi saat ini dilihat dari faktor eksternal, untuk faktor eksternal yang dilihat adalah faktor peluang dan ancaman yang dihadapi oleh RSUD Cut Meutia Aceh Utara, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana peluang dan ancaman tersebut pada saat ini untuk melihat peramalan (*Forecasting*) pada masa yang akan datang, sehingga dapat dilakukan analisa-analisa proyeksi untuk empat (4) tahun ke depan.

Faktor-faktor Internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan, adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh RSUD Cut Meutia Aceh Utara. Sehingga hasil dari analisa tersebut sangat membantu untuk mengetahui seberapa besar nilai dari faktor internal.

Hal yang sama juga dilakukan pada faktor-faktor Eksternal. Hasil analisa pada situasi dalam RSUD Cut Meutia Aceh Utara dikelompokkan menjadi faktor kekuatan dan kelemahan. Hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot dan skala akan menghasilkan nilai evaluasi faktor internal (IFE).

Tabel. 2.5
Analisa Peluang dan Ancaman Organisasi
dengan Menggunakan Matriks EFE

| | Peluang | Bobot | Skala 1-4 | Bobot 2 x Skala |
|---|---|-------|-----------|-----------------|
| 1 | RS rujukan bagi wilayah Aceh Utara & sekitarnya | 0,15 | 4 | 0,6 |
| 2 | Lokasi strategis | 0,05 | 3 | 0,15 |
| 3 | Jumlah Penduduk | 0,05 | 3 | 0,15 |
| 4 | Dukungan Pemerintah Daerah | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 5 | Penambahan Produk Layanan Kesehatan | 0,12 | 3 | 0,36 |
| | | | | |
| | Total | 0,47 | | 1,46 |

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

| | Ancaman | Bobot | Skala 1-4 | Bobot 2 x Skala |
|---|---|-------|-----------|-----------------|
| 1 | RS Swasta Banyak Menggunakan Tenaga Dokter Spesialis RSU Cut Meutia | 0,14 | 1 | 0,14 |
| 2 | Kompetisi semakin tajam | 0,12 | 2 | 0,24 |
| 3 | Regulasi BPJS Yang Dapat Merugikan RS | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 4 | Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan RS | 0,04 | 2 | 0,08 |
| 5 | Kondisi Pandemi Covid-19 | 0,15 | 1 | 0,15 |
| | | | | |
| | Total | 0,55 | | 0,81 |

ANCAMAN

Skala 4= Merupakan ANCAMAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan ANCAMAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan ANCAMAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan ANCAMAN berskala besar

Tabel.2.6
Analisa Kekuatan dan Kelemahan Organisasi
dengan Menggunakan Matriks IFE

| Kekuatan | | Bobot | Skala 1-4 | Bobot 2 x Skala |
|----------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | Terakreditasi Paripurna | 0,14 | 4 | 0,56 |
| 2 | RSU Pendidikan | 0,12 | 4 | 0,48 |
| 3 | Dokter Spesialis | 0,1 | 3 | 0,3 |
| 4 | Adanya Produk Layanan Unggulan | 0,06 | 3 | 0,18 |
| 5 | RSU Berstatus BLUD | 0,03 | 3 | 0,09 |
| Total | | 0,45 | | 1,61 |

KEKUATAN

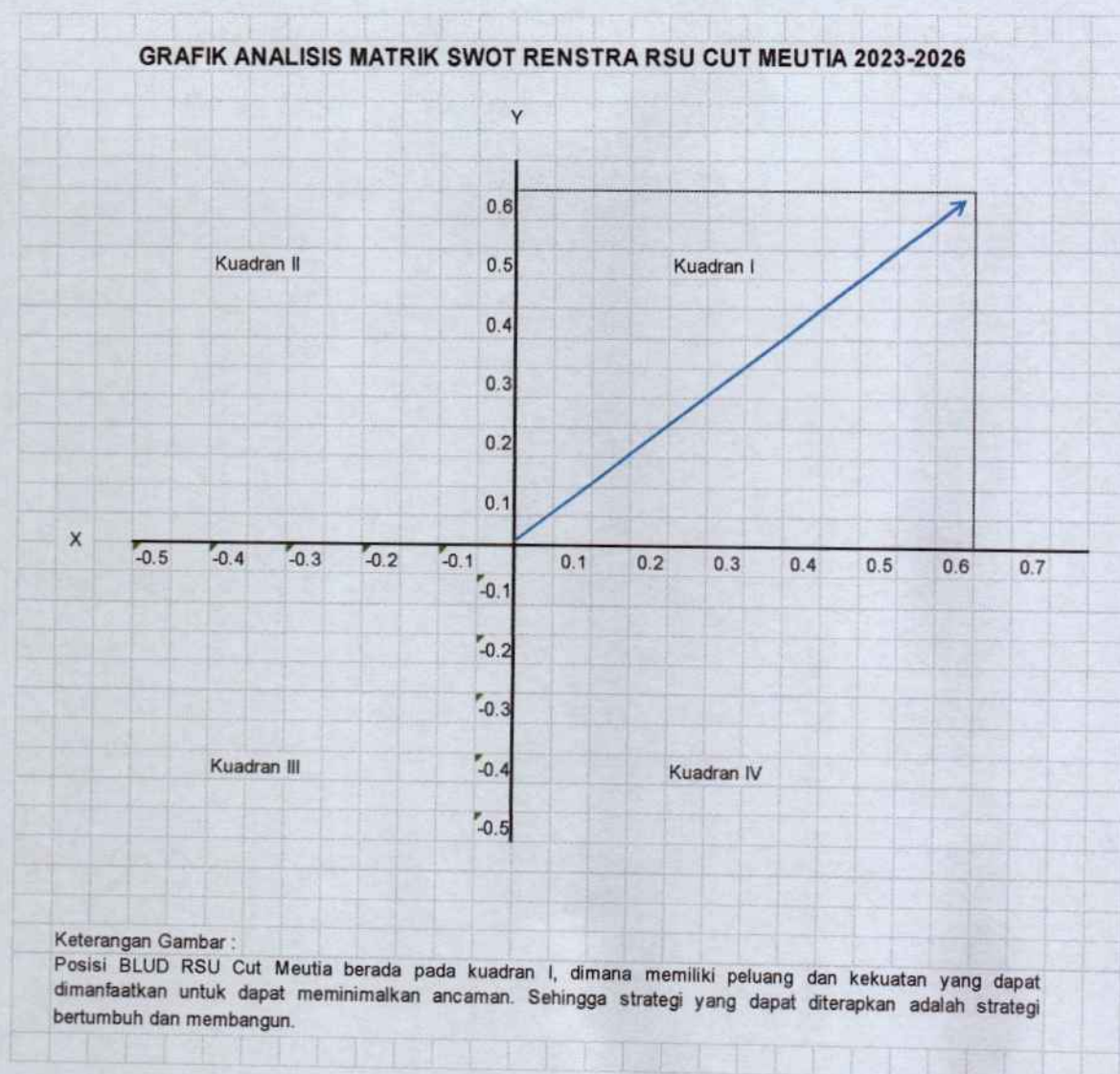
Skala 4= Merupakan KEKUATAN berskala baik/besar
Skala 3= Merupakan KEKUATAN berskala sedang
Skala 2= Merupakan KEKUATAN berskala kecil
Skala 1= Merupakan KEKUATAN berskala sangat kecil/tidak ada

| Kelemahan | | Bobot | Skala 1-4 | Bobot 2 x Skala |
|-----------|---|-------|-----------|-----------------|
| 1 | Disiplin Pegawai Rendah | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 2 | Reward and punishment belum berjalan | 0.09 | 2 | 0.18 |
| 3 | Jumlah Tenaga Yang Berlebih | 0.08 | 3 | 0.24 |
| 4 | Pemasaran belum dijalankan secara optimal | 0.06 | 3 | 0.18 |
| 5 | Waktu Tunggu Pasien | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Total | | 0.38 | | 0.95 |

KELEMAHAN

Skala 4= Merupakan KELEMAHAN berskala sangat kecil/tidak ada
Skala 3= Merupakan KELEMAHAN berskala kecil
Skala 2= Merupakan KELEMAHAN berskala sedang
Skala 1= Merupakan KELEMAHAN berskala besar

| | | | |
|---------|------|------|------|
| Sumbu X | 1,61 | 0,95 | 0,66 |
| Sumbu Y | 1,46 | 0,81 | 0,65 |



MATRIKS ANALISIS SWOT RENCANA STRATEGIS BLUD RSU CUT MEUTIA TAHUN 2023-2026

| | | | S | | W | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | No | Strengths (Faktor Kekuatan Intern) | No | Weakness (Faktor Kelemahan Internal) |
| O | 1 | Terakreditasi Paripurna | 0,56 | | 1 | Disiplin Pegawai Rendah |
| | 2 | RSU Pendidikan | 0,48 | | 2 | Reward and punishment belum berjalan |
| | 3 | Dokter Spesialis | 0,3 | | 3 | Jumlah Tenaga Yang Berlebih |
| | 4 | Adanya Produk Layanan Unggulan | 0,18 | | 4 | Pemasaran belum dijalankan secara optimal |
| | 5 | RSU Berstatus BLUD | 0,09 | | 5 | Waktu Tunggu Pasien |
| | | | Strategi SO (Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) | | Strategi WO (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang) | |
| T | 1 | RS rujukan bagi wilayah Aceh Utara & sekitarnya | 0,6 | - Melengkapi Jenis Pelayanan Spesifik | - Peningkatan Disiplin Pegawai - Rasionalisasi Tenaga Sesuai Kebutuhan - Pendaftaran Online Pasien | |
| | 2 | Lokasi strategis | 0,15 | - Melengkapi Peralatan Medis | | |
| | 3 | Jumlah Penduduk | 0,15 | - Mempertahankan Akreditasi | | |
| | 4 | Dukungan Pemerintah Daerah | 0,2 | | Strategi WT (Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) | |
| | 5 | Penambahan Produk Layanan Kesehatan | 0,36 | | | |
| | | | Strategi ST (Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman) | | | |
| T | 1 | RS Swasta Banyak Menggunakan Tenaga Dokter Spesialis RSU Cut Meutia | 0,14 | - Peningkatan Ketahanan Kesehatan Menghadapi Pandemi Covid-19 | - Meningkatkan Pemasaran Produk Layanan - Menerapkan Reward dan Punishment Sesuai Aturan | |
| | 2 | Kompetisi semakin tajam | 0,24 | - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kepatuhan Peraturan Yang Telah Ditetapkan RS | | |
| | 3 | Regulasi BPJS Yang Dapat Merugikan RS | 0,2 | | | |
| | 4 | Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan RS | 0,08 | | | |
| | 5 | Kondisi Pandemi Covid-19 | 0,15 | | | |

Sebagai data pendukung untuk menganalisa faktor kekuatan dan kelemahan berikut indikator pelayanan rumah sakit dan jumlah kunjungan tahun 2017-2021.

Tabel 2.7
Indikator Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2017 – 2021

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | BOR (%) | 83 | 83 | 81 | 54 | 48 |
| 2 | LOS (hr) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | NDR (%) | 1 | 1 | 0.16 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | GDR (%) | 3 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.62 |
| 5 | TOI (hr) | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |

Sumber Rekam Medis RSU Cut Meutia

Tabel 2.8
Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2017 – 2021

| No | Jenis Pelayanan | Tahun | | | | |
|----|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rawat Jalan | 149.112 | 147.689 | 144.797 | 93.053 | 91.749 |
| 2 | Rawat Inap | 18.315 | 20.032 | 19.098 | 11.876 | 10.472 |

Sumber Rekam Medis RSU Cut Meutia

Tabel 2.9
Angka Rujukan Pasien Tahun 2017 – 2021

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Angka Rujukan | 4.192 | 3.366 | 2.308 | 1.612 | 1.889 |

Rujukan pasien keluar dari RSU Cut Meutia dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya banyak kasus yang sudah dapat ditangani di RSU Cut Meutia. Kondisi ini lebih disebabkan oleh bertambahnya layanan kesehatan yang disediakan dan juga pemenuhan alat-alat kesehatan sesuai standar.

Tabel 2.10
Data Pelayanan Pasien Covid-19 Tahun 2020 – 2022

| No | Uraian | Tahun | | | Total |
|----|---------------------|-------|------|------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pasien Sembuh | 229 | 238 | 9 | 476 |
| 2 | Pasien Meninggal | 40 | 97 | 1 | 138 |
| 3 | Pasien Dirujuk | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Nakes Terkonfirmasi | 38 | 80 | 0 | 118 |

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini

diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia.

Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan status keadaan darurat melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 360/ 184/ 2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Aceh Utara dan telah menetapkan tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 di tingkat Kabupaten Aceh Utara melalui surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 440/ 183/ 2020. Dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara, RSUD Cut Meutia berperan penting terhadap penanganan pasien yang terpapar virus covid-19. Untuk itu dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/ 41/ KEP/ DIR/ III/ 2020 maka dibentuk lah tim gugus tugas percepatan penanganan di RSUD Cut Meutia. Yang bertugas melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, memfasilitasi program dan teknis penanganan covid-19 di RSUD Cut Meutia. Serta membuat kebijakan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan perencanaan dalam hal penanganan/ perawatan pasien covid-19.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Rumah Sakit Rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepmen nomor HK.01.07./ MENKES/169/2020. Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit

infeksi emerging tertentu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu.
2. Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi emerging tertentu.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Kasus covid pertama kali terjadi di RSUD Cut Meutia bulan maret 2020, setiap bulannya angka covid-19 semakin bertambah hingga akhir 2021. Tahun 2022 angka covid-19 drastis menurun, namun status pandemi belum dicabut oleh karena itu RSUD Cut Meutia mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 kembali dengan menjadikan isu strategis di dalam renstra RSUD Cut Meutia tahun 2023-2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD CUT MEUTIA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Secara umum, permasalahan yang dihadapi di RSUD Cut Meutia saat ini khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan masih belum tercukupi.
2. Tenaga dokter spesialis belum lengkap.
3. Angka rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya masih tinggi.
4. Menurunnya kunjungan akibat persepsi masyarakat terhadap covid-19.
5. keamanan, ketertiban dan kedisiplinan dalam lingkungan rumah sakit.
6. Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai mitra RSUD Cut Meutia sering berubah-ubah.
7. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh RSUD Cut Meutia.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2020. Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah

mencapai 71.5 Tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki-laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (Healthy Adjusted Life Expectancy/ HALE). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Dilihat dari beban penyakit (disease burden) yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3 % pada tahun 1990 menjadi 23,6 % pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 % pada tahun 1990 menjadi 69,9 % pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 % pada tahun 1990 menjadi 6,5 % pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging disease). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging

disease), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 Tujuan Strategis dan 8 Sasaran Strategis:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;

percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Merujuk kepada salah satu isu strategis Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023- 2026 yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka isu strategis yang ditangani Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Angka harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih dibawah rata-rata Nasional.
2. Angka Kematian Ibu tahun 2021 di Aceh sebesar 223/100.000 Kelahiran Hidup, meningkat dari tahun 2020 yang hanya 172/100.000 Kelahiran Hidup.
3. Masih tingginya Prevalensi Stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen.
4. Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 triliyun menjadi 350 Milyar ditahun 2022.
5. Masih adanya potensi peningkatan kasus pandemi covid-19, dimana di Aceh sudah dikonfirmasi sebanyak 38.458 orang pada bulan januari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 2.067 atau sebesar 5 persen atau diatas rata-rata nasional sebesar 3,3 persen. Target Vaksinasi covid-19 di Aceh adalah 4.028.891 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi pertam sebesar 3.197.989 jiwa atau 79,4 persen (Januari 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 88,80 persen.

6. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat Provinsi yang masih bertumpu pada Rumah Sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 Rumah Sakit Regional yaitu 1) Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dhien di Meulaboh, 2) Rumah Sakit Regional RSU Yuliddin Away di Tapak Tuan, 3) Rumah Sakit Datu Beru di Takengon, 4) Rumah Sakit regional Langsa dan 5) Rumah Sakit regional Bireuen.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan dengan indikator indeks pembangunan manusia. adapun sasarannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan indikator sasaran :

- Angka usia harapan hidup
- Persentase balita stunting
- Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
- Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
- Persentase rumah sakit regional yang fungsional.

Dari telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diatas, RSU Cut Meutia termasuk ke dalam kategori kebijakan penguatan sistem kesehatan yang meliputi :

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan

3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan Kesehatan dan penelitian Kesehatan
5. Penguatan pelaksanaan JKN

Berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada indikator-indikator pembangunan kesehatan dalam narasi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
2. Meningkatnya status gizi masyarakat;
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

3.4 Penentuan Isu – isu strategis.

- a. Pandemi covid-19 belum berakhir, maret 2020 awal mulai pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Utara. Sampai akhir tahun 2021 sudah 606 pasien yang sudah ditangani RSUD Cut Meutia dengan rincian 459 orang pasien sembuh, 137 pasien meninggal dan 5 pasien di rujuk. Selain masyarakat, tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Cut Meutia juga terinfeksi virus covid-19 sebanyak 118 orang. Penanganan pandemi covid-19 membutuhkan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Obat-obatan yang cukup banyak sehingga menguras biaya operasional RS. Kekhawatiran masyarakat akan terpaparnya covid-19 dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD juga meningkat, sehingga berimbas kepada jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan.
- b. Peningkatan pelayanan rumah sakit melalui penambahan layanan spesialis dan peningkatan sarana, prasarana, serta alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan sesuai

standar RSU kelas B diantaranya pelayanan medik, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik, penunjang non klinik, dan rawat inap. Pelayanan medik yang dimaksud diatas terdiri dari pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis penunjang, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik subspesialis, dan pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.

- c. Peningkatan pendidikan melalui pendidikan formal serta pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan SDM kesehatan yang ada di RSU Cut Meutia.
- d. Peningkatan promosi kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menaati aturan yang telah ditetapkan RS. Media promosi dapat berupa leaflet, banner, dan baliho dengan metode tatap muka.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Cut Meutia

- **Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) :**

- a. Nilai Indeks Kepuasan Pasien
- b. Angka Harapan Hidup

- ***Tujuan dan Sasaran***

Adapun tujuan RSUD Cut Meutia Aceh Utara yang akan dicapai di tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien
- 1.2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami

Adapun sasaran Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang akan dicapai di tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.1 Meningkatkan pelayanan publik
- 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Cut Meutia beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| Nb | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Kondisi Awal Tahun 2021 | Kondisi Awal Tahun 2022 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke- | | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien | | Indeks Reformasi Birokrasi | 50,53 | - | 55 | 55 | 60,2 | 60,4 |
| | | Meningkatkan Pelayanan Publik | Nilai Indeks Kepuasan Pasien | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| | | | Nilai AKIP | BB (72) | B (64-20) | B (60-70) | B (60-70) | B (60-70) | B (70-80) |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami | | Indeks Pembangunan Manusia | 69,46 | - | 70 | 71 | 71,5 | 72 |
| | | Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat | Bed Occupancy Rate (BOR) | 48 | 69 | 75 | 76 | 77 | 78 |

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumah Sakit Umum Cut Meutia perlu menetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar apa yang ingin dicapai bisa benar-benar terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah serta rencana strategis kementerian kesehatan. Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur sarana, prasarana, dan alat Kesehatan maka fokus prioritas rencana pembangunan ditetapkan dengan:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya manusia.
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan alat-alat Kesehatan.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama :

- (i) program-program pembangunan infrastruktur kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- (ii) program-program peningkatan kompetensi SDM medis, tenaga medis, penunjang medis dan administrasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Adapun kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi jenis pelayanan spesifik dengan menambah tenaga medis spesialis dan sub spesialis melalui program kemitraan dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDS-BK), hal ini bertujuan agar angka rujukan dapat ditekan serta masyarakat dapat dilayani di RSUD Cut Meutia. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit pasal 19 ayat 2, RSUD Cut Meutia sudah memenuhi kriteria kelas B. Rencana kedepan RSUD Cut Meutia akan melengkapi pelayanan rehabilitasi medik, bedah saraf, bedah anak, bedah plastic, forensik, sub spesialis anak, sub spesialis obgyn dan endodonsi.

2. Melengkapi, meningkatkan dan mengembangkan peralatan medis dan penunjang medis sesuai dengan kelas rumah sakit serta pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung pelayanan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat penggunaan layanan rumah sakit.
3. Mempertahankan status akreditasi Rumah Sakit melalui peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta memberikan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
4. Kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang masih melanda Kabupaten Aceh Utara.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan RSUD Cut Meutia.
6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) harus segera terintegrasi dengan baik antar unit-unit dan instalasi di dalam RSUD Cut Meutia.
7. Peningkatan disiplin pegawai melalui pemberian reward and punishment kepada pegawai RSUD Cut Meutia.
8. Rasionalisasi tenaga berdasarkan kebutuhan dan penempatan pegawai rumah sakit sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Pendaftaran antrian pasien secara online melalui aplikasi smartphone atau jaringan internet.

10. Meningkatkan pemasaran produk layanan unggulan yang dimiliki RSUD Cut Meutia kepada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah pelayanan RSUD.
11. Penerapan sistem dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kelas Rumah Sakit.
12. Memberi kesempatan belajar para pegawai seluas-luasnya untuk pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
13. Menetapkan dan menyusun program prioritas strategis secara partisipatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan
14. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah dan terpadu

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada table berikut :

| Tabel 5 | | | | |
|---|---|----------|---|---|
| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien | 1 Meningkatkan Pelayanan Publik | 1 | Peningkatan Tata Kelola Manajemen SDM RSUD | 1 Meningkatkan Tata Kelola SDM |
| | | 2 | Peningkatan Pelayanan SIM RS | 2 Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Publik |
| | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan | 3 Meningkatkan Kualitas SDM |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat dan Budaya Islami | 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat |
| | | 2 | Peningkatan Ketahanan Kesehatan Menghadapi Pandemi | 2 Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Pandemi |
| | | 3 | Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan | 3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana dan Alat-alat Kesehatan |

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada prinsipnya, program, kegiatan dan subkegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan RSUD Cut Meutia Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Lebih lanjut, program, kegiatan dan subkegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Atas dasar tersebut, maka program, kegiatan dan subkegiatan RSUD Cut Meutia Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 penyajiannya menggunakan tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---|--|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--|--------|------------|--|----|--|--------|--|------------|--|--------|--|----|--|
| | | | | | | Tahun 2023 | | | | | | Tahun 2024 | | | | | | | | Tahun 2025 | | | | | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | Target | | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 142,065,969,838 | | 145,371,969,838 | | 149,186,365,714 | | 152,486,365,714 | | 595,100,671,104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 141,266,074,348 | 100% | 144,612,974,348 | 100% | 147,927,370,224 | 100% | 151,227,370,224 | 100% | 585,064,680,144 | RSU Cut Meutis | Buket Rata | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65 Dokumen/ Laporan | 65 | 25,500,000 | 65 | 26,000,000 | 65 | 27,000,000 | 65 | 28,000,000 | 65 | 108,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 | 1,500,000 | 6 | 2,000,000 | 6 | 2,000,000 | 6 | 2,000,000 | 6 | 7,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 9,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 9,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Efektif dan Efisien | | 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 52 Laporan | 52 | 5,000,000 | 52 | 5,000,000 | 52 | 5,000,000 | 52 | 5,500,000 | 208 | 20,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,500,000 | 12 | 20,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 30,718,770,224 | 100% | 30,718,770,224 | 100% | 30,718,770,224 | 100% | 30,718,770,224 | 100% | 122,875,080,866 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 428 Orang | 428 Orang | 30,697,170,224 | 428 Orang | 30,697,170,224 | 428 Orang | 30,697,170,224 | 428 Orang | 30,697,170,224 | 428 Orang | 122,768,680,866 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengukuran/ Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 21,600,000 | 100 Dokumen | 21,600,000 | 100 Dokumen | 21,600,000 | 100 Dokumen | 21,600,000 | 100 Dokumen | 86,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 100% | 168,604,124 | 100% | 164,604,124 | 100% | 160,000,000 | 100% | 160,000,000 | 100% | 751,208,248 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 42 unit/paket | 47 unit/paket | 168,604,124 | 50 unit/paket | 164,604,124 | 52 unit/paket | 160,000,000 | 55 unit/paket | 160,000,000 | 204 unit/paket | 751,208,248 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.06 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 100% | 359,100,000 | 100% | 358,600,000 | 100% | 357,600,000 | 100% | 356,600,000 | 100% | 1,431,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|--|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--|--------|
| | | | | | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan | 36 Laporan | 48 Laporan | 184,200,000 | 48 Laporan | 184,200,000 | 48 Laporan | 184,200,000 | 48 Laporan | 184,200,000 | 192 Laporan | 736,800,000 | | | | |
| | | 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 174,400,000 | 12 Laporan | 174,400,000 | 12 Laporan | 173,400,000 | 12 Laporan | 172,400,000 | 48 Laporan | 695,100,000 | | | | |
| | | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara | 8 Unit | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 32 Unit | 100,000,000 | | | | |
| | | 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya | 8 Unit | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 8 Unit | 25,000,000 | 32 Unit | 100,000,000 | | | | |
| | | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 87% | 87% | 110,000,000,000 | 87% | 113,300,000,000 | 88% | 116,600,000,000 | 88% | 119,900,000,000 | 88% | 459,800,000,000 | | | | |
| | | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit | 1 Unit | 110,000,000,000 | 1 Unit | 113,300,000,000 | 1 Unit | 116,600,000,000 | 1 Unit | 119,900,000,000 | 1 Unit | 459,800,000,000 | | | | |
| | | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Rujukan Ke Fasilitas Lainnya Turun | 1.889 Rujukan | 1.650 Rujukan | 758,995,490 | 1.800 Rujukan | 758,995,490 | 1.770 Rujukan | 1,258,995,490 | 1.750 Rujukan | 1,268,995,490 | 1.750 Rujukan | 4,035,981,990 | RSU Cut Meutia | Buket Rata | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kondisi Baik | 77.60 % | 78% | 758,995,490 | 78.5% | 758,995,490 | 79% | 1,258,995,490 | 79.5% | 1,268,995,490 | 79.5% | 4,035,981,990 | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Derajat Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 0 | - | - | - | - | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 2 unit | 400,000,000 | | | | |
| | | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan | 1 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 200,000,000 | 1 Unit | 200,000,000 | 2 unit | 400,000,000 | | | | |
| | | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan | 122 Unit | 8 Unit | 758,995,490 | 5 Unit | 758,995,490 | 4 Unit | 758,995,490 | 3 Unit | 758,995,490 | 20 unit | 3,035,981,990 | | | | |
| | | 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | 0 | - | - | - | - | 2 unit | 100,000,000 | 3 unit | 100,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | | | | |

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian kinerja RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tentunya harus dapat diukur dengan jelas agar pembangunan dan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan diukurnya tingkat keberhasilan kinerja RSUD Cut Meutia, baik dalam akhir tahun anggaran maupun akhir periode jabatan Bupati Aceh Utara pada Tahun 2022.

Adapun Indikator Kinerja RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Utara dapat kami uraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatkan Pelayanan Publik, Adapun indikator kinerjanya adalah meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Pasien. Program Prioritas dari sasaran ini adalah :

- Program penunjangurusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sasaran 2 :

Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, Adapun indikator kinerjanya adalah meningkatnya angka harapan hidup. Program prioritas dari sasaran ini adalah :

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Berikut tabel indikator kinerja RSUD Cut Meutia yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel 7.1 :

| Tabel 7 | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Indikator Kinerja RSUD Cut Meutia yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | | | | | | | |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |
| | | Tahun 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Pasien | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 77.75 |
| 2 | Nilai AKIP | B (64-20) | B (60-70) | B (60-70) | B (60-70) | B (70-80) | B (70-80) |
| 2 | Bed Occupancy Rate (BOR) | 69 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026 ini disusun dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2023-2026. Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja RSUD Cut Meutia secara bertahap selama empat tahun kedepan agar lebih terarah dan berkesinambungan, Renstra ini merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan di bidang pelayanan yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah untuk pembangunan sektor kesehatan dalam kurun waktu 2023-2026.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara akan terus melakukan pembenahan secara bertahap dengan memenuhi sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya dengan target capaian sebagai berikut:


1. Melengkapi jenis-jenis pelayanan medis yang lebih spesifik dengan melakukan langkah-langkah pemenuhan alat-alat medis dan penunjang serta pengembangan gedung sesuai dengan kelas Rumah Sakit, serta mencari tenaga dokter spesialis dengan cara kemitraan dan program PPDS BK.
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sebagai media pusat informasi internal dan umum bagi masyarakat. Dengan berjalannya SIM RS dapat meningkatkan kualitas pelayanan, penghematan anggaran belanja, waktu pelayanan semakin efektif serta penerapan reward dan punishment kepada pegawai untuk meningkatkan disiplin kerja.

3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

RENCANA KERJA TIM
PENYUSUNAN RENSTRA
PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026


| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | | JULI | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Persiapan Penyusunan Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan SK Tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orientasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kerja Tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Penyiapan Data-Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rancangan Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Rancangan Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyajian Rancangan Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Pelaksanaan Forum SKPD/Musrenbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Forum SKPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Musrenbang Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Forum SKPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rancangan Akhir Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perumusan Rancangan Akhir Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifikasi Rancangan Akhir Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Penetapan Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyampaian Rancangan Akhir Renstra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifikasi Rancangan Renstra dengan RPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengesahan Renstra Oleh Bupati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

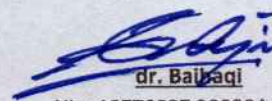
Lhokseumawe, 10 Mei 2022
Direktur RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara


dr. Baibagi
Pembina Tk.I
Nip. 19770827 200904 1 003

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Utara**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja | √ | | | |
| 2 | Pengolahan data dan informasi | √ | | | |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 4 | Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi | √ | | | |
| 5 | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota | √ | | | |
| 6 | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 7 | Perumusan isu-isu strategis | √ | | | |
| 8 | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 9 | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | √ | | | |
| 10 | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 11 | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 12 | Mempelajari Surat Edaran Bupati/ Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/ Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 13 | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/ Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 14 | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan | √ | | | |
| 15 | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 16 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | | √ | | |
| 17 | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah | √ | | | |
| 18 | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 19 | Penetapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/ Kota | √ | | | |
| 20 | Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah disahkan | √ | | | |


 Lhokseumawe, 10 Mei 2022
 Direktur RSU Cut Meutia
 Kabupaten Aceh Utara


 dr. Baihaqi
 Nip. 19770827 200904 1 003



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/ 77 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT
UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti poin b diktum kesatu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam merumuskan tujuan, sasaran, target kinerja strategis serta arah kebijakan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2025;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026" dengan susunan Personalia tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra);
 - b. menyempurnakan rancangan Renstra untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program kegiatan berdasarkan strategi, arah kebijakan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
 - c. menyampaikan rancangan Renstra kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di verifikasi.
 - d. menyempurnakan kembali rancangan akhir renstra dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian.

e. menyampaikan kembali rancangan renstra yang telah disempurnakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renstra.

KETIGA : Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050 / 77 /2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|--|
| 1 | Direktur RSU Cut Meutia | Ketua |
| 2 | Kepala Bagian Program | Sekretaris |
| 3 | Wakil Direktur Administrasi dan Umum | Ketua Pokja Administrasi dan Umum |
| 4 | Kepala Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 5 | Kepala Bagian Keuangan | Anggota |
| 6 | Kasubbag. Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota |
| 7 | Kasubbag. Kepegawaian | Anggota |
| 8 | Perencana RSU Cut Meutia | Anggota |
| 9 | Analisis Anggaran RSU Cut Meutia | Anggota |
| 10 | Staf Bidang Program | Anggota |
| 11 | Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Informasi | Ketua Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi |
| 12 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan RS | Anggota |
| 13 | Kepala Bidang Rekam Medik dan Informasi | Anggota |
| 14 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda | Anggota |
| 15 | Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang | Ketua Pokja Pelayanan dan Penunjang |
| 16 | Kepala Bidang Pelayanan Medis | Anggota |
| 17 | Kepala Bidang Keperawatan | Anggota |
| 18 | Kepala Bidang Penunjang Medis | Anggota |
| 19 | Penatalaksanaan Barang | Anggota |
| 20 | Ketua Komite Medik | Anggota |
| 21 | Ketua Komite Komkordik | Anggota |
| 22 | Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien | Anggota |
| 23 | Ketua Komite Keperawatan | Anggota |
| 24 | Ketua Komite Farmasi | Anggota |
| 25 | Ketua Komite PPRA | Anggota |
| 26 | Ketua Komite PPI | Anggota |

BUPATI ACEH UTARA
H. MUHAMMAD THAIB